



PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN
NASIONAL NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA
RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan proses bisnis pada arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu mengubah arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 43 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 43 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 154 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 43 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional ini.

Pasal II

Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2023

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 204 TAHUN 2023
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2023

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Tujuan SPBE antara lain:

- a. mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel;
- b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- c. meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

Selain itu SPBE berperan sebagai Pendukung Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah dan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi dibutuhkan kerangka dasar Arsitektur SPBE yang mendeskripsikan integrasi domain arsitektur yaitu Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

Manfaat dari arsitektur SPBE antara lain:

- a. menghilangkan tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan;
- b. menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta memperkuat Keamanan Informasi;
- c. menerapkan standarisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital Nasional (Service Level Agreement);
- d. berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia;
- e. memudahkan integrasi layanan pemerintah, sehingga menumbuhkan-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru; dan
- f. meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE. sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Arsitektur SPBE terdiri atas:

- a. Arsitektur SPBE Nasional;
- b. Arsitektur SPBE Instansi Pusat; dan
- c. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional. Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Instansi Pusat.

Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan rencana strategis Instansi Pusat. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan rewieu sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan dan pengembangan SPBE instansi menjadi sangat penting, untuk menjadi bagian dalam mendukung terwujudnya layanan pemerintah yang terintegrasi secara nasional. Untuk itu setiap instansi perlu untuk menyusun Arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE masing-masing instansi agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan dengan lancar dan maksimal.

1.2. **Identifikasi Masalah**

- a. belum adanya Arsitektur SPBE Perpusnas sebagai panduan untuk menyusun peta rencana SPBE Perpusnas; dan
- b. belum adanya Arsitektur SPBE Perpusnas yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan pembangunan dan pengembangan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE instansi adalah:

- a. Menyusun Arsitektur SPBE instansi yang mendeskripsikan proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE, dan Layanan SPBE; dan
- b. Menyusun peta rencana SPBE yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi

BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi dalam pembangunan dan pengembangan SPBE instansi memperhatikan keselarasan program pembangunan nasional yang didasarkan pada dua kebijakan strategis nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan arahan Presiden Republik Indonesia mengenai percepatan transformasi digital nasional.

2.1. RPJMN 2020–2024

Dalam menyelaraskan program dan kegiatan SPBE dalam Arsitektur SPBE Nasional, maka perlu dipetakan kegiatan dan program dari RPJMN 2020–2024 yang berkaitan dengan transformasi digital dan yang memerlukan pelaksanaan SPBE instansi

2.2. Transformasi Digital Instansi

Pada sub bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa transformasi digital dalam RPJMN 2020–2024 menjadi salah satu pendekatan inovatif sebagai pengarusutamaan pembangunan nasional, untuk itu perlu berbagai upaya nyata untuk melancarkan pengarusutamaan transformasi digital, yang utamanya diharapkan dapat berimbas pada perbaikan layanan publik instansi.

Dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang dijelaskan diatas, maka SPBE instansi dapat menjadi pondasi yang kuat sebagai bagian dalam mewujudkan ekosistem Government as a Platform untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, netral, profesional, dan berlandaskan hukum, dengan didukung oleh pilar Aparatur Sipil Negara (ASN), kelembagaan dan proses bisnis organisasi, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pengawasan, sebagaimana terlihat pada **Gambar 1**.

Gambar 1. SPBE sebagai *Government as a Platform*.



2.3. Kebijakan Satu Data Indonesia

Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah. SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan anta instansi pusat dan pemerintah daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Pelaksanaan kebijakan SDI instansi sangat erat kaitannya dengan

BAB III KERANGKA KERJA SPBE

Kerangka kerja SPBE instansi, tersusun dari unsur SPBE, manajemen SPBE, rencana induk, peta rencana strategis, serta empat pilar SPBE, sesuai dengan lingkup pembangunan dan pengembangan SPBE instansi, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1. Unsur SPBE

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diharapkan dapat diwujudkan melalui tata kelola SPBE. Tata kelola SPBE diterapkan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Unsur-unsur SPBE ini antara lain:

- a. rencana induk SPBE Nasional;
- b. arsitektur SPBE instansi;
- c. peta rencana SPBE instansi, memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan audit TIK;
- d. rencana dan anggaran SPBE instansi;
- e. proses bisnis instansi;
- f. data dan informasi instansi;
- g. infrastruktur SPBE instansi;
- h. aplikasi SPBE instansi;
- i. keamanan SPBE instansi; dan
- j. layanan SPBE instansi.

Gambaran keterpaduan seluruh unsur-unsur SPBE diatas dapat diwujudkan dalam sebuah arsitektur SPBE instansi, yang menggambarkan keterpaduan dari seluruh domain arsitektur SPBE instansi yang selaras nasional yang terdiri dari:

- a. Domain arsitektur proses bisnis;
- b. Domain arsitektur data dan informasi;
- c. Domain arsitektur layanan;
- d. Domain arsitektur aplikasi;
- e. Domain arsitektur infrastruktur;
- f. Domain arsitektur keamanan.

3.2. Manajemen SPBE

Manajemen SPBE instansi adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE instansi yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta operasional layanan pemerintah yang berkualitas. Penerapan manajemen SPBE instansi dilaksanakan antara lain:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen asset TIK;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;

- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen layanan SPBE.

3.3. Peta Rencana SPBE Instansi

Peta Rencana SPBE Instansi disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi, dan rencana strategis Instansi. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Instansi dengan Peta Rencana SPBE Nasional, pimpinan Instansi berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Peta Rencana SPBE Instansi dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dilakukan berdasarkan:

- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
- b. perubahan rencana strategis Instansi;
- c. perubahan Arsitektur SPBE Instansi; atau
- d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Instansi.

BAB IV ARSITEKTUR SPBE PERPUSTAKAAN NASIONAL

Untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi dibutuhkan kerangka dasar atau Arsitektur SPBE yang mendeskripsikan domain arsitektur yaitu proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

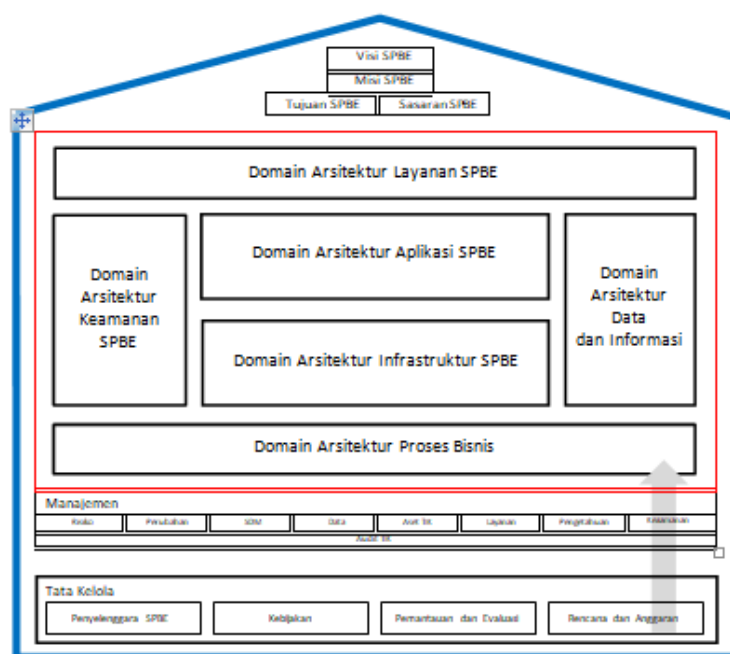
- a. manfaat dari arsitektur SPBE antara lain:
 - b. menghilangkan tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan;
 - c. menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta memperkuat Keamanan Informasi;
 - d. menerapkan standardisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital Nasional (Service Level Agreement);
 - e. berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia;
 - f. memudahkan integrasi layanan pemerintah, sehingga menumbuhkan-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru; dan
 - g. meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE.
- sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE.

Arsitektur SPBE terdiri atas:

- a. Arsitektur SPBE Nasional;
- b. Arsitektur SPBE Instansi Pusat; dan
- c. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional. Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Instansi Pusat.

Sesuai susunan dalam kerangka kerja SPBE, maka dapat diilustrasikan sebagaimana pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Kerangka Kerja SPBE

4.1. **Arsitektur Proses Bisnis**

Referensi Arsitektur Proses Bisnis digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada lingkup instansi. Untuk itu telah dilakukan kajian penyusunan referensi arsitektur Proses Bisnis di lingkungan Perpustakaan RI yang mengacu pada regulasi terkait tugas dan fungsi Perpustakaan RI. Adapun hasilnya dapat dilihat pada data terlampir.

Sedangkan Subtansi Arsitektur Proses Bisnis merupakan komponen nyata yang ada/sedang dilakukan dalam kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diemban. Bagian ini merupakan upaya penyamaan persepsi dan pemahaman untuk seluruh IPPD.

Hasil pemetaan Arsitektur Proses Bisnis Perpustakaan terdapat 31 proses bisnis seperti pada table berikut :

Subtansi Arsitektur	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat V
1. Pengembangan Koleksi Nasional	pengembangan bahan perpustakaan
2. Pengolahan Bahan Perpustakaan	pengelolaan bahan perpustakaan
3. Layanan Pemustaka	penyelenggaraan perpustakaan
4. Pelestarian Koleksi Nasional	pelestarian bahan perpustakaan
5. Pengembangan dan Pelestarian Naskah Nusantara	pelestarian bahan perpustakaan
6. Pengelolaan Standar Nasional Perpustakaan	standar nasional perpustakaan
7. Pembinaan Perpustakaan	pembinaan dan pengembangan perpustakaan
8. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Perpustakaan	profesi perpustakaan
9. Akreditasi Bidang Perpustakaan	akreditasi perpustakaan
10. Kajian dan Analisis Perpustakaan.	pembinaan dan pengembangan perpustakaan
11. Pengelolaan Perencanaan Strategis	koordinasi perencanaan strategis
12. Pengelolaan Kinerja Organisasi	evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
13. Pengelolaan Pengawasan Keuangan	pelaksanaan pengawasan internal instansi
14. Pengelolaan Pengendalian Capaian Kinerja	pelaporan akuntabilitas kinerja instansi
15. Pengelolaan Kode Etik Pegawai	integrasi kepegawaian
16. Pengelolaan Manajemen Risiko	pengelolaan manajemen risiko instansi
17. Penyusunan Peraturan	koordinasi penyusunan peraturan perundang undangan instansi
18. Pengelolaan Advokasi dan Hak Cipta	pelayanan hukum
19. Pengelolaan Keuangan	pengelolaan keuangan instansi
20. Pengelolaan Rumah Tangga dan Umum.	koordinasi kerumahtanggaan instansi
21. Pengelolaan Proses Bisnis	pelayanan ketatalaksanaan

Subtansi Arsitektur	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat V
22. Pengelolaan Prosedur	pembinaan ketatalaksanaan
23. Pengelolaan Reformasi Birokrasi	pengelolaan reformasi birokrasi
24. Pengelolaan SDM Aparatur	koordinasi kepegawaian
25. Pengembangan Kompetensi	pembinaan kepegawaian
26. Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai	koordinasi kepegawaian
27. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perkantoran	pengelolaan data dan informasi
28. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perpustakaan	pengelolaan infrastruktur TIK instansi
29. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Media	koordinasi kehumasan
30. Pengelolaan Kerja Sama Antarlembaga	pelayanan kerja sama
31. Pengelolaan Keprotokolan	protokoler

Dengan hasil pemetaan seperti di atas didapat hasil Arsitektur Proses Bisnis seperti pada table berikut ini:

Tabel Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat I	Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat II	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat III	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat IV	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat V
08.01 budaya dan agama	RAB.08.01.01 kebudayaan	RAB.08.01.01.01 perpustakaan	RAB.08.01.01.01.01 apresiasi perpustakaan	RAB.08.01.01.01.01.0 1 apresiasi pembudayaan kegemaran membaca
				RAB.08.01.01.01.01.0 2 apresiasi perpustakaan khusus
				RAB.08.01.01.01.01.0 3 apresiasi perpustakaan perguruan tinggi
				RAB.08.01.01.01.01.0 4 apresiasi perpustakaan sekolah/madrasah
				RAB.08.01.01.01.01.0 5 apresiasi perpustakaan umum
				RAB.08.01.01.01.01.0 6 apresiasi profesi bidang perpustakaan
			RAB.08.01.01.01.02 bahan	RAB.08.01.01.01.02.0 1 informasi bahan

Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat I	Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat II	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat III	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat IV	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat V
			perpustakaan	perpustakaan
				RAB.08.01.01.01.02.0 2 kebijakan informasi bahan perpustakaan
				RAB.08.01.01.01.02.0 3 pelestarian bahan perpustakaan
				RAB.08.01.01.01.02.0 4 pengelolaan bahan perpustakaan
				RAB.08.01.01.01.02.0 5 pengembangan bahan perpustakaan
			RAB.08.01.01.01.03 kebijakan perpustakaan	RAB.08.01.01.01.03.0 1 kebijakan nasional perpustakaan
				RAB.08.01.01.01.03 . 02 kebijakan teknis perpustakaan
				RAB.08.01.01.01.03 . 03 umum perpustakaan
			RAB.08.01.01.01.04 layanan perpustakaan	RAB.08.01.01.01.04.0 1 budaya baca
				RAB.08.01.01.01.04 . 02 informasi dan promosi
				RAB.08.01.01.01.04.0 3 pengelolaan jasa informasi perpustakaan
				RAB.08.01.01.01.04.0 4 pengelolaan layanan ekstensi
				RAB.08.01.01.01.04.0 5 pengelolaan layanan perpustakaan
				RAB.08.01.01.01.04 . 06 pengelolaan layanan referensi

Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat I	Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat II	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat III	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat IV	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat V
				RAB.08.01.01.01.04 . 07 pengelolaan layanan sirkulasi
			RAB.08.01.01.01.05 pengelolaan perpustakaan	RAB.08.01.01.01.05.0 1 pembinaan dan pengembangan perpustakaan
				RAB.08.01.01.01.05.0 2 penyelenggaraan perpustakaan
				RAB.08.01.01.01.05.0 3 perencanaan nasional perpustakaan
				RAB.08.01.01.01.05.0 4 profesi perpustakaan
				RAB.08.01.01.01.05.0 5 perpustakaan
				RAB.08.01.01.01.05.0 6 transformasi dan inovasi perpustakaan
			RAB.08.01.01.01.06 standardisasi perpustakaan	RAB.08.01.01.01.06.0 1 akreditasi perpustakaan
				RAB.08.01.01.01.06.0 2 literasi masyarakat
				RAB.08.01.01.01.06.0 3 norma, prosedur, dan kriteria perpustakaan
				RAB.08.01.01.01.06.0 4 pengelolaan standardisasi perpustakaan
				RAB.08.01.01.01.06.0 5 sistem informasi perpustakaan
				RAB.08.01.01.01.06.0 5 sistem nasional perpustakaan
				RAB.08.01.01.01.06.0 6 standar nasional

Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat I	Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat II	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat III	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat IV	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat V
				perpustakaan RAB.08.01.01.01.06.0 7 tajuk kendali nasional
			RAB.08.01.01.01.07 sumber daya perpustakaan	RAB.08.01.01.01.07.0 1 pengelolaan sumber daya perpustakaan
RAB.09 Pemerintah n Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.06 administrasi pemerintahan	RAB.09.06.06.01 dukungan administrasi instansi	RAB.09.06.06.01. 01 integrasi layanan administrasi
				RAB.09.06.06.01. 02 koodinasi pembinaan administrasi
				RAB.09.06.06.01. 03 koordinasi layanan administrasi
				RAB.09.06.06.01. 04 koordinasi pengendalian administrasi
				RAB.09.06.06.01. 05 sinkronisasi layanan administrasi
			RAB.09.06.06.02 dukungan hukum instansi	RAB.09.06.06.02. 01 bantuan hukum
				RAB.09.06.06.02. 02 koordinasi hukum
				RAB.09.06.06.02. 03 koordinasi penyusunan peraturan perundang undangan instansi
				RAB.09.06.06.02.

Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat I	Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat II	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat III	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat IV	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat V
				04 pelayanan administrasi umum hukum
				RAB.09.06.06.02.05 pelayanan hukum
				RAB.09.06.06.02.06 pembinaan hukum
				RAB.09.06.06.02.07 penyiapan koordinasi kebijakan
				RAB.09.06.06.02.08 pertimbangan hukum
				RAB.09.06.06.02.09 sinkronisasi penyusunan kebijakan
			RAB.09.06.06.03 dukungan kearsipan instansi	RAB.09.06.06.03.01 koordinasi urusan kearsipan
				RAB.09.06.06.03.02 pelayanan kearsipan
				RAB.09.06.06.03.03 pembinaan kearsipan
				RAB.09.06.06.03.04 penyusunan urusan kearsipan
			RAB.09.06.06.04 dukungan kehumasan instansi	RAB.09.06.06.04.01 koordinasi kehumasan
				RAB.09.06.06.04.02 koordinasi kerja sama
				RAB.09.06.06.04.03 pelayanan kehumasan
				RAB.09.06.06.04.04 pelayanan kerja sama
				RAB.09.06.06.04.05 protokoler
				RAB.09.06.06.04.06 sinkronisasi kehumasan

Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat I	Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat II	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat III	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat IV	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat V
				RAB.09.06.06.04. 07 sinkronisasi k erja sama
			RAB.09.06.06.05 dukungan keorganisasian instansi	RAB.09.06.06.05. 01 evaluasi kelem bagaan
				RAB.09.06.06.05. 02 koordinasi uru san organisasi
				RAB.09.06.06.05. 03 pelayanan org anisasi
				RAB.09.06.06.05. 04 pembinaan ke organisasian
				RAB.09.06.06.05. 05 pengelolaan o rganisasi
				RAB.09.06.06.05. 06 sinkronisasi ur usan organisasi
			RAB.09.06.06.06 dukungan kepegawaian instansi	RAB.09.06.06.06. 02 integrasi kepe gawaian
				RAB.09.06.06.06. 03 koordinasi kep egawaian
				RAB.09.06.06.06. 04 koordinasi pen endalian kepega waian
				RAB.09.06.06.06. 05 pelayanan kep egawaian
				RAB.09.06.06.06. 06 pembinaan ke pegawaian
				RAB.09.06.06.06. 07 penyusunan k epegawaian
				RAB.09.06.06.06. 08 sinkronisasi k epegawaian
			RAB.09.06.06.07 dukungan kerumahtanggaan	RAB.09.06.06.07. 01 koordinasi ker umahtanggaan in

Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat I	Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat II	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat III	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat IV	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat V
			instansi	stansi
				RAB.09.06.06.07. 02 pelayanan ker umahtangga
				RAB.09.06.06.07. 03 pembinaan ke rumahtangga
				RAB.09.06.06.07. 04 penyusunan k erumahtangga instansi
				RAB.09.06.06.07. 05 sinkronisasi k erumahtangga instansi
			RAB.09.06.06.08 dukungan ketatalaksanaan instansi	RAB.09.06.06.08. 01 pelayanan ket atalaksanaan
				RAB.09.06.06.08. 02 pembinaan ket atalaksanaan
			RAB.09.06.06.09 dukungan ketatausahaan instansi	RAB.09.06.06.09. 01 koordinasi ket atausahaan
				RAB.09.06.06.09. 02 pelayanan ket atausahaan
				RAB.09.06.06.09. 03 pembinaan ket atausahaan
				RAB.09.06.06.09. 04 penyusunan k etatausahaan
				RAB.09.06.06.09. 05 sinkronisasi k etatausahaan
			RAB.09.06.06.10 dukungan keuangan instansi	RAB.09.06.06.10. 01 evaluasi keuan gan instansi
				RAB.09.06.06.10. 02 pelaporan keu angan instansi
				RAB.09.06.06.10. 03 pemantauan k euangan instansi
				RAB.09.06.06.10. 04 pembinaan ke uangan instansi
				RAB.09.06.06.10.

Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat I	Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat II	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat III	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat IV	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat V
				05 pembinaan pe rbendaharaan ins tansi
				RAB.09.06.06.10. 06 pengelolaan B MN
				RAB.09.06.06.10. 07 pengelolaan k euangan instansi
				RAB.09.06.06.10. 08 pengelolaan P NBP instansi
				RAB.09.06.06.10. 09 penyelesaian k erugian negara
			RAB.09.06.06.11 dukungan pendidikan dan pelatihan instansi	RAB.09.06.06.11. 01 akreditasi pela tihan perpustaka an
				RAB.09.06.06.11. 02 pembinaan pel atihan instansi
				RAB.09.06.06.11. 03 pembinaan pe ndidikan instansi
				RAB.09.06.06.11. 04 penyelenggaraan pelatihan perpustakaan
			RAB.09.06.06.12 dukungan penelitian instansi	RAB.09.06.06.12. 01 pembinaan pe nelitian instansi
			RAB.09.06.06.13 dukungan pengembangan instansi	RAB.09.06.06.13. 01 pembinaan pe ngembangan inst ansi
			RAB.09.06.06.14 d ukungan perencan aan umum instansi	RAB.09.06.06.14. 01 koordinasi ang garan instansi
				RAB.09.06.06.14. 02 koordinasi pel aporan instansi
				RAB.09.06.06.14. 03 koordinasi per encanaan instansi
				RAB.09.06.06.14. 04 koordinasi per encanaan strategi

Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat I	Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat II	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat III	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat IV	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat V
				S
				RAB.09.06.06.14. 05 koordinasi pro gram instansi
			RAB.09.06.06.15 dukungan perlengkapan instansi	RAB.09.06.06.15. 01 pengelolaan p enerbitan
				RAB.09.06.06.15. 02 pengelolaan pengadaan barang dan jasa
				RAB.09.06.06.15. 03 pengelolaan perlengkapan
			RAB.09.06.06.16 dukungan persandian instansi	RAB.09.06.06.16. 01 koordinasi per sandian
				RAB.09.06.06.16. 02 pembinaan persandian
				RAB.09.06.06.16. 03 penyusunan persandian
				RAB.09.06.06.16. 04 sinkronisasi penyusunan persandian
			RAB.09.06.06.17 dukungan TIK instansi	RAB.09.06.06.17. 01 kebijakan TIK instansi
				RAB.09.06.06.17. 02 pengelolaan data dan informasi
				RAB.09.06.06.17. 03 pengelolaan infrastruktur TIK instansi
				RAB.09.06.06.17. 04 pengelolaan JDIH
				RAB.09.06.06.17. 05 pengelolaan PPID
				RAB.09.06.06.17. 06 repositori jejaring nasional perpustakaan digital nasional

Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat I	Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat II	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat III	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat IV	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat V
		RAB.09.06.02 akuntabilitas aparatur dan pengawasan	RAB.09.06.02.01 pembinaan akuntabilitas kinerja instansi	RAB.09.06.02.01. 01 evaluasi akuntabilitas kinerja instansi RAB.09.06.02.01. 02 pelaporan akuntabilitas kinerja instansi RAB.09.06.02.01. 03 pemantauan akuntabilitas kinerja instansi
			RAB.09.06.02.02 pembinaan pengawasan internal instansi	RAB.09.06.02.02. 01 bimbingan teknis pengawasan internal RAB.09.06.02.02. 02 evaluasi pengawasan internal RAB.09.06.02.02. 03 kebijakan pengawasan internal RAB.09.06.02.02. 04 kebijakan pengawasan internal instansi RAB.09.06.02.02. 05 pelaksanaan pengawasan internal instansi RAB.09.06.02.02. 06 pelaporan pengawasan internal RAB.09.06.02.02. 07 pemantauan pengawasan internal RAB.09.06.02.02. 08 pengawasan tujuan tertentu instansi

Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat I	Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat II	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat III	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat IV	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat V
				RAB.09.06.02.02.09 pengelolaan zona integritas instansi
		RAB.09.06.01 reformasi birokrasi	RAB.09.06.01.01 pembinaan reformasi birokrasi instansi	RAB.09.06.01.01.01 pengelolaan manajemen risiko instansi
				RAB.09.06.01.01.02 pengelolaan reformasi birokrasi

4.2. Pembangunan/Pengembangan Arsitektur Data dan Informasi

Referensi Arsitektur Data dan Informasi digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari seluruh data dan informasi yang dimiliki oleh instansi. Sedangkan Subtansi Arsitektur Data dan Informasi merupakan kumpulan data atau informasi (data set) yang dimiliki instansi sebagai aset luaran atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan sesuai tugas dan fungsi instansi.

Hasil pengumpulan substansi Arsitektur Data dan Informasi Perpunas terdapat 58 data dan informasi sebagai berikut :

1. Data Wajib Serah;
2. Data Koleksi Serah Simpan KCKR;
3. Data Koleksi Hasil Pengadaan BP;
4. Data Pemanfaatan Layanan Online Perpustakaan Nasional;
5. Data Pemanfaatan Layanan On-site Gedung Layanan Perpustakaan Nasional;
6. Data Pemanfaatan Layanan Koleksi Bahan Pustaka;
7. Data Pemanfaatan Layanan Fasilitas Perpustakaan;
8. Jumlah Pertumbuhan anggota perpustakaan online dan Onsite;
9. Data Pemanfaatan Layanan Informasi;
10. Data Pemanfaatan Layanan Pengaduan;
11. Data Pemanfaatan Layanan Referensi Virtual;
12. Data Pemanfaatan Layanan Media Sosial Perpustakaan Nasional RI;
13. Data Alih Aksara, Alih Bahasa, Penyaduran, dan Kajian Naskah Kuno Nusantara;
14. Data Jurnal Naskah Kuna Nusantara (Jumantara)
15. Data Pernaskahan Nusantara;
16. Data Pemanfaatan Radio Streaming Widya Bahana Swara;
17. Data Aplikasi Nomor Pokok Perpustakaan Sekolah/ Madrasah & Perguruan Tinggi;

18. Data Katalog;
19. Data Tajuk Kendali;
20. Data Statistik ISBN;
21. Data Terbitan;
22. Data Pustakawan;
23. Data Sertifikasi Pustakawan;
24. Data Uji Kompetensi;
25. Data Sirkulasi;
26. Data Bibliografi;
27. Data Koleksi;
28. Data Keanggotaan;
29. Data Sirkulasi;
30. Data Kunjungan;
31. Data Akreditasi Perpustakaan;
32. Data sensus identifikasi kondisi kerusakan bahan perpustakaan dan naskah kuno;
33. Data hasil alih media master bentuk CD/DVD/BR;
34. Data hasil alih media master bentuk mikrofilm;
35. Data hasil alih media digital pada khastara;
36. Data hasil konservasi karya rekam;
37. Data hasil konservasi karya cetak;
38. Data hasil penjiidan bahan perpustakaan;
39. Data hasil konservasi naskah kuno;
40. Data hasil alihmedia naskah kuno;
41. Data hasil pelestarian naskah daerah;
42. Data hasil Reprografi bahan perpustakaan;
43. Aplikasi Nomor Pokok Perpustakaan Umum dan Khusus;
44. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2020;
45. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) Tahun 2020;
46. Data Analisis Kinerja Perpustakaan;
47. Direktori Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
48. Data Barang Milik Negara (BMN);
49. Data Kepegawaian;
50. Data Profil Tenaga Perpustakaan dan Fungsional Pustakawan;
51. Data regulasi Perpustakaan;
52. Jumlah Buku yang diterbitkan Perpustakaan;
53. Jumlah Penulis buku yang diterbitkan Perpustakaan;
54. Data Kerjasama;
55. Jumlah Permohonan Informasi;
56. Data capaian atas indikator kinerja Perpustakaan;
57. Data Hasil Audit BPK; dan
58. Data realisasi anggaran dan fisik Perpustakaan.

Berdasarkan jabaran substansi data dan informasi tersebut, telah dipetakan arsitektur data dan informasi sebagai berikut:

4.3. Pembangunan/Pengembangan Arsitektur Layanan SPBE

Referensi Arsitektur Layanan SPBE digunakan sebagai acuan dalam

menentukan jenis atau tipe dari seluruh kegiatan atau program yang dapat dilakukan baik yang berimbas kepada masyarakat (G2C), dunia usaha/industry (G2B), instansi pemerintah (G2G), ataupun pada pegawai (G2E).

Sedangkan Subtansi Arsitektur Layanan SPBE merupakan kegiatan atau program yang telah direncanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan sesuai tugas dan fungsi instansi.

Hasil pemetaan Arsitektur Layanan Perpustnas terdapat 37 data dan informasi sebagai berikut:

1. Penghimpunan koleksi KCKR;
2. Penambahan Koleksi Nasional Perpustakaan;
3. Peningkatan Layanan ISBN dan ISMN;
4. Penyusunan Literatur Sekunder;
5. Peningkatan Koleksi Perpustakaan yang diolah;
6. Peningkatan Indeks Pelayanan Publik;
7. Peningkatan Kepuasan Pemustaka;
8. Peningkatan Kunjungan Pemustaka;
9. Peningkatan alih aksara, alih bahasa, dan penelitian naskah kuno;
10. Peningkatan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
11. Peningkatan Bahan Perpustakaan dialihmediakan;
12. Pelayanan Pemustaka Perpustakaan Proklamator Bung Karno;
13. Peningkatan Kepuasan Pemustaka Perpustakaan Proklamator Bung Karno;
14. Penyusunan dokumen kajian dan kebijakan pengembangan layanan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno;
15. Pelayanan Pemustaka Perpustakaan Proklamator Bung Hatta;
16. Peningkatan Kepuasan Pemustaka Perpustakaan Proklamator Bung Hatta;
17. Penyusunan dokumen kajian dan kebijakan pengembangan layanan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta;
18. Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Umum;
19. Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Khusus;
20. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
21. Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Madrasah;
22. Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi;
23. Standardisasi perpustakaan;
24. Penerbitan NSPK bidang Perpustakaan;
25. Pembuatan Dokumen Kajian perpustakaan, budaya baca, dan literasi;

26. Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
27. Pengembangan dan pembinaan kegemaran membaca dan literasi;
28. Penyelenggaraan Diklat tenaga perpustakaan;
29. peningkatan tenaga perpustakaan yang profesional;
30. peningkatan tenaga perpustakaan yang dibina dan dikembangkan;
31. Peningkatan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan;
32. Peningkatan kepuasan layanan data dan informasi;
33. implementasi SMKI berbasis ISO27001;
34. implementasi Manajemen Layanan TIK berbasis ISO20000;
35. Peningkatan maturitas SPIP Perpustnas;
36. Pengelolaan Indeks profesionalitas ASN; dan
37. Peningkatan Nilai pengawasan kearsipan.

Berdasarkan Substansi arsitektur layanan yang dijabarkan tersebut pemetaan yang dapat disajikan dalam arsitektur layanan SPBE Perpustnas adalah sebagai berikut:

Tabel Arsitektur Layanan SPBE

Usulan Referensi Arsitektur Proses Layanan

Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat I	Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat II	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat III	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat IV	Usulan Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat V
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Data Kebudayaan	RAL.01.42.01 Perpustakaan	RAL.01.42.01.01 Layanan Budaya Perpustakaan	RAL.01.42.01.01.01 Layanan Kegemaran Membaca
				RAL.01.42.01.01.02 Layanan Perpustakaan Khusus
				RAL.01.42.01.01.03 Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi

				RAL.01.42.01.01.04 Layanan Perpustakaan Sekolah/Madr asah
				RAL.01.42.01.01.05 Layanan Perpustakaan Umum
				RAL.01.42.01.01.06 Layanan Profesi Bidang Perpustakaan
			RAL.01.42.01.02 Layanan Bahan Perpustakaan	RAL.01.42.01.02.01 Layanan Jenis Bahan Perpustakaan
				RAL.01.42.01.02.02 Layanan Kebijakan Informasi Bahan Perpustakaan
				RAL.01.42.01.02.03 Layanan Pelestarian Bahan Perpustakaan
				RAL.01.42.01.02.04 Layanan Pengelolaan Bahan Perpustakaan
				RAL.01.42.01.02.05 Layanan Pengembangan Bahan Perpustakaan
			RAL.01.42.01.03 Layanan Kebijakan Perpustakaan	RAL.01.42.01.03.01 Layanan Kebijakan Nasional Perpustakaan
				RAL.01.42.01.03.02 Layanan

				Kebijakan Teknis Perpustakaan
				RAL.01.42.01. 03.03 Layanan Kebijakan Umum Perpustakaan
			RAL.01.42.01.0 4 Layanan Perpustakaan	RAL.01.42.01. 04.01 Layanan Budaya Baca
				RAL.01.42.01. 04.02 Layanan Informasi Dan Promosi
				RAL.01.42.01. 04.03 Layanan Pengelolaan Jasa Informasi Perpustakaan
				RAL.01.42.01. 04.04 Layanan Pengelolaan Layanan Ekstensi
				RAL.01.42.01. 04.05 Layanan Pengelolaan Layanan Perpustakaan
				RAL.01.42.01. 04.06 Layanan Pengelolaan Layanan Referensi
				RAL.01.42.01. 04.07 Layanan Pengelolaan Layanan Sirkulasi
			RAL.01.42.01.0 5 Layanan Pengelolaan Perpustakaan	RAL.01.42.01. 05.01 Layanan Pembinaan Dan

				Pengembangan Perpustakaan
				RAL.01.42.01.05.02 Layanan Penyelenggaraan Perpustakaan
				RAL.01.42.01.05.03 Layanan Perencanaan Nasional Perpustakaan
				RAL.01.42.01.05.04 Layanan Profesi Perpustakaan
				RAL.01.42.01.05.05 Layanan Promosi Perpustakaan
				RAL.01.42.01.05.06 Layanan Transformasi Dan Inovasi Perpustakaan
			RAL.01.42.01.06 Layanan Standardisasi Perpustakaan	RAL.01.42.01.06.01 Layanan Akreditasi Perpustakaan
				RAL.01.42.01.06.02 Layanan Indeks Literasi Masyarakat
				RAL.01.42.01.06.03 Layanan Norma, Prosedur, Dan Kriteria Perpustakaan
				RAL.01.42.01.06.04 Layanan Pengelolaan Standardisasi

				Perpustakaan
				RAL.01.42.01.06.05 Layanan Sistem Informasi Perpustakaan
				RAL.01.42.01.06.06 Layanan Sistem Nasional Perpustakaan
				RAL.01.42.01.06.07 Layanan Standar Nasional Perpustakaan
				RAL.01.42.01.06.08 Layanan Tajuk Kendali Nasional
			RAL.01.42.01.07 Layanan Sumber Daya Perpustakaan	RAL.01.42.01.07.01 Layanan Pengelolaan Sumber Daya Perpustakaan
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.01 Aparatur Negara Bidang Perpustakaan	RAL.02.04.01.01 Dukungan Administrasi Instansi	RAL.02.04.01.01.01 Integrasi Layanan Administrasi
				RAL.02.04.01.01.02 Koodinasi Pembinaan Administrasi
				RAL.02.04.01.01.03 Koordinasi

				Layanan Administrasi
				RAL.02.04.01.01.04 Koordinasi Pengendalian Administrasi
				RAL.02.04.01.01.05 Sinkronisasi Layanan Administrasi
			RAL.02.04.01.02 2 Dukungan Hukum Instansi	RAL.02.04.01.02.01 Bantuan Hukum
				RAL.02.04.01.02.02 Koordinasi Hukum
				RAL.02.04.01.02.03 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang Undangan Instansi
				RAL.02.04.01.02.04 Pelayanan Administrasi Umum Hukum
				RAL.02.04.01.02.05 Pelayanan Hukum
				RAL.02.04.01.02.06 Pembinaan Hukum
				RAL.02.04.01.02.07 Penyiapan

				Koordinasi Kebijakan
				RAL.02.04.01.02.08 Pertimbangan Hukum
				RAL.02.04.01.02.09 Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan
			RAL.02.04.01.03 3 Dukungan Kearsipan Instansi	RAL.02.04.01.03.01 Koordinasi Urusan Kearsipan
				RAL.02.04.01.03.02 Pelayanan Kearsipan
				RAL.02.04.01.03.03 Pembinaan Kearsipan
				RAL.02.04.01.03.04 Penyusunan Urusan Kearsipan
			RAL.02.04.01.04 4 Dukungan Kehumasan Instansi	RAL.02.04.01.04.01 Koordinasi Kehumasan
				RAL.02.04.01.04.02 Koordinasi Kerja Sama
				RAL.02.04.01.04.03 Pelayanan Kehumasan

				RAL.02.04.01. 04.04 Pelayanan Kerja Sama
				RAL.02.04.01. 04.05 Protokoler
				RAL.02.04.01. 04.06 Sinkronisasi Kehumasan
				RAL.02.04.01. 04.07 Sinkronisasi Kerja Sama
			RAL.02.04.01.0 5 Dukungan Keorganisasian Instansi	RAL.02.04.01. 05.01 Evaluasi Kelembagaan
				RAL.02.04.01. 05.02 Koordinasi Urusan Organisasi
				RAL.02.04.01. 05.03 Pelayanan Organisasi
				RAL.02.04.01. 05.04 Pembinaan Keorganisasia n
				RAL.02.04.01. 05.05 Pengelolaan Organisasi
				RAL.02.04.01. 05.06 Sinkronisasi Urusan Organisasi

			RAL.02.04.01.06 Dukungan Kepegawaian Instansi	RAL.02.04.01.06.01 Administrasi Kepegawaian
				RAL.02.04.01.06.02 Integrasi Kepegawaian
				RAL.02.04.01.06.03 Koordinasi Kepegawaian
				RAL.02.04.01.06.04 Koordinasi Pengendalian Kepegawaian
				RAL.02.04.01.06.05 Pelayanan Kepegawaian
				RAL.02.04.01.06.06 Pembinaan Kepegawaian
				RAL.02.04.01.06.07 Penyusunan Kepegawaian
				RAL.02.04.01.06.08 Sinkronisasi Kepegawaian
			RAL.02.04.01.07 Dukungan Kerumahtanggaan Instansi	RAL.02.04.01.07.01 Koordinasi Kerumahtanggaan Instansi
				RAL.02.04.01.07.02 Pelayanan Kerumahtanggg

				aan
				RAL.02.04.01.07.03 Pembinaan Kerumahtanggaan
				RAL.02.04.01.07.04 Penyusunan Kerumahtanggaan Instansi
				RAL.02.04.01.07.05 Sinkronisasi Kerumahtanggaan Instansi
			RAL.02.04.01.08 8 Dukungan Ketatalaksanaan Instansi	RAL.02.04.01.08.01 Pelayanan Ketatalaksanaan
				RAL.02.04.01.08.02 Pembinaan Ketatalaksanaan
			RAL.02.04.01.09 9 Dukungan Ketatausahaan Instansi	RAL.02.04.01.09.01 Koordinasi Ketatausahaan
				RAL.02.04.01.09.02 Pelayanan Ketatausahaan
				RAL.02.04.01.09.03 Pembinaan Ketatausahaan
				RAL.02.04.01.09.04 Penyusunan Ketatausahaan

				RAL.02.04.01. 09.05 Sinkronisasi Ketatausahaan
			RAL.02.04.01.1 0 Dukungan Keuangan Instansi	RAL.02.04.01. 10.01 Evaluasi Keuangan Instansi
				RAL.02.04.01. 10.02 Pelaporan Keuangan Instansi
				RAL.02.04.01. 10.03 Pemantauan Keuangan Instansi
				RAL.02.04.01. 10.04 Pembinaan Keuangan Instansi
				RAL.02.04.01. 10.05 Pembinaan Perbendahara an Instansi
				RAL.02.04.01. 10.06 Pengelolaan BMN
				RAL.02.04.01. 10.07 Pengelolaan Keuangan Instansi
				RAL.02.04.01. 10.08 Pengelolaan PNBP Instansi
				RAL.02.04.01. 10.09 Penyelesaian

				Kerugian Negara
			RAL.02.04.01.1 1 Dukungan Pendidikan Dan Pelatihan Instansi	RAL.02.04.01.11.01 Akreditasi Pelatihan Perpustakaan
				RAL.02.04.01.11.02 Pembinaan Pelatihan Instansi
				RAL.02.04.01.11.03 Pembinaan Pendidikan Instansi
				RAL.02.04.01.11.04 Penyelenggaraan Pelatihan Perpustakaan
			RAL.02.04.01.1 2 Dukungan Penelitian Instansi	RAL.02.04.01.12.01 Pembinaan Penelitian Instansi
			RAL.02.04.01.1 3 Dukungan Pengembangan Instansi	RAL.02.04.01.13.01 Pembinaan Pengembangan Instansi
			RAL.02.04.01.1 4 Dukungan Perencanaan Umum Instansi	RAL.02.04.01.14.01 Koordinasi Anggaran Instansi
				RAL.02.04.01.14.02 Koordinasi Pelaporan Instansi

				RAL.02.04.01.14. 03 Koordinasi Perencanaan Instansi
				RAL.02.04.01.14. 04 Koordinasi Perencanaan Strategis
				RAL.02.04.01.14. 05 Koordinasi Program Instansi
			RAL.02.04.01.1 5 Dukungan Perlengkapan Instansi	RAL.02.04.01.15. 01 Pengelolaan Penerbitan
				RAL.02.04.01.15. 02 Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
				RAL.02.04.01.15. 03 Pengelolaan Perlengkapan
			RAL.02.04.01.1 6 Dukungan Persandian Instansi	RAL.02.04.01.16. 01 Koordinasi Persandian
				RAL.02.04.01.16. 02 Pembinaan Persandian
				RAL.02.04.01.16. 03 Penyusunan Persandian
				RAL.02.04.01.16. 04 Sinkronisasi Penyusunan Persandian

			RAL.02.04.01.1 7 Dukungan TIK Instansi	RAL.02.04.01.17. 01 Kebijakan TIK Instansi
				RAL.02.04.01.17. 02 Pengelolaan Data Dan Informasi
				RAL.02.04.01.17. 03 Pengelolaan Infrastruktur TIK Instansi
				RAL.02.04.01.17. 04 Pengelolaan JDIH
				RAL.02.04.01.17. 05 Pengelolaan PPID
				RAL.02.04.01. 17.06 Repositori Jejaring Nasional Perpustakaan Digital Nasional
		RAL.02.04.0 2 Akuntabilita s Aparatur	RAL.02.04.02.0 1 Pembinaan Akuntabilitas Kinerja Instansi	RAL.02.04.02.01. 01 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
				RAL.02.04.02.01. 02 Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
				RAL.02.04.02.01. 03 Pemantauan Akuntabilitas Kinerja Instansi
		RAL.02.04.0 3 Pengawasan	RAL.02.04.03.0 1 Pembinaan Pengawasan Internal	RAL.02.04.03. 01.01 Bimbingan Teknis

			Instansi	Pengawasan Internal
				RAL.02.04.03.01.02 Evaluasi Pengawasan Internal
				RAL.02.04.03.01.03 Kebijakan Pengawasan Internal
				RAL.02.04.03.01.04 Kebijakan Pengawasan Internal Instansi
				RAL.02.04.03.01.05 Pelaksanaan Pengawasan Internal Instansi
				RAL.02.04.03.01.06 Pelaporan Pengawasan Internal
				RAL.02.04.03.01.07 Pemantauan Pengawasan Internal
				RAL.02.04.03.01.08 Pengawasan Tujuan Tertentu Instansi
				RAL.02.04.03.01.09 Pengelolaan Zona Integritas Instansi
		RAL.02.04.04 Reformasi Birokrasi	RAL.02.04.04.01 Pembinaan Reformasi Birokrasi Instansi	RAL.02.04.04.01.01 Pengelolaan Manajemen Risiko Instansi

				RAL.02.04.04.01. 02 Pengelolaan Reformasi Birokrasi
--	--	--	--	--

4.4. Pembangunan/Pengembangan Arsitektur Aplikasi SPBE

Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari aplikasi yang digunakan secara berbagi pakai dalam mendukung Layanan SPBE. Sedangkan Subtansi Arsitektur Aplikasi SPBE merupakan Aplikasi yang dimiliki dan digunakan guna mendukung Layanan SPBE yang sedang dilakukan/dalam perencanaan dengan cara berbagi pakai.

Hasil pemetaan Arsitektur Aplikasi Perpustakaan terdapat 26 data dan informasi sebagai berikut :

1. INLIS enterprise;
2. e-Deposit;
3. Pendataan perpustakaan;
4. Layanan e-Resources;
5. Pendaftaran anggota online;
6. IPusnas;
7. Indonesia Onesearch;
8. Sistem Informasi Kepegawaian Perpustakaan (SIMPEG);
9. ELDIKA;
10. JDIH;
11. INLISLite
12. Penghimpun Konten Web;
13. Satu Pintu Pendataan KCKR;
14. Layanan Tajuk Online;
15. Layanan ISBN;
16. ISRC;
17. KIN/BNI;
18. KIPi;
19. Uji kompetensi pustakawan;
20. e-kinerja;
21. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE);
22. e-Performance;
23. OPAC;
24. e-Preservasi;
25. It Service Desk; dan
26. Virtual tour Perpustakaan Nasional.

Berdasarkan jabaran hasil pemetaan arsitektur aplikasi, berikut disajikan referensi arsitektur aplikasi sebagai berikut:

Domain Proses Aplikasi

Usulan Referensi Arsitektur Proses Aplikasi

Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat I	Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat II	Usulan Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat III	Usulan Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat IV	Usulan Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat V
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	RAA.01.01.01 Aplikasi Layanan Publik Perpustakaan	RAA.01.01.01.01 Aplikasi Perpustakaan Terintegrasi	RAA.01.01.01.01 Aplikasi Penelusuran Informasi Bahan Perpustakaan
				RAA.01.01.01.02 Aplikasi Pengadaan Bahan Pustaka
				RAA.01.01.01.03 Aplikasi Pengelolaan Bahan Pustaka
				RAA.01.01.01.04 Aplikasi Pelestarian Bahan Pustaka
				RAA.01.01.01.05 Aplikasi Sirkulasi Bahan Pustaka
		RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	RAA.01.02.01 Aplikasi Administrasi Pemerintahan Bidang Perpustakaan	
			RAA.01.02.01.01 Aplikasi Perencanaan Perpustakaan	
			RAA.01.02.01.02 Aplikasi Penganggaran Perpustakaan	
			RAA.01.02.01.03 Aplikasi Keuangan Perpustakaan	
			RAA.01.02.01.04 Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa Perpustakaan	
			RAA.01.02.01.05 Aplikasi Pengawasan Internal Perpustakaan	
			RAA.01.02.01.06 Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perpustakaan	
Referensi Arsitektur Aplikasi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Usulan Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat	Usulan Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat IV	Usulan Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat V

Tingkat I	Tingkat II	III		
			RAA.01.02.01.08 Aplikasi Pengaduan Pelayann Publik Perpustakaan	
			RAA.01.02.01.09 Aplikasi Data Terbuka Perpustakaan	
			RAA.01.02.01.10 Aplikasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Terkait Perpustakaan	
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu	RAA.02.01.01. Aplikasi Khusus Perpustakaan	RAA.02.01.01.01 Aplikasi Khusus Pembudayaan Perpustakaan	RAA.02.01.01.01.01 Aplikasi Khusus Kegemaran Membaca
				RAA.02.01.01.01.02 Aplikasi Perpustakaan Khusus
				RAA.02.01.01.01.03 Aplikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi
				RAA.02.01.01.01.04 Aplikasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah
				RAA.02.01.01.01.05 Aplikasi Perpustakaan Umum
				RAA.02.01.01.01.06 Aplikasi Profesi Bidang Perpustakaan
				RAA.02.01.01.01.07 Aplikasi Pembinaan Dan Pengembangan Perpustakaan
				RAA.02.01.01.01.08 Aplikasi Promosi Perpustakaan
				RAA.02.01.01.01.09 Aplikasi Transformasi Dan Inovasi Perpustakaan
Referensi Arsitektur Aplikasi	Referensi Arsitektur Aplikasi	Usulan Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat	Usulan Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat IV	Usulan Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat V

Tingkat I	Tingkat II	III		
				RAA.02.01.01.01.01 O Aplikasi Pengelolaan Sumber Daya Perpustakaan
				RAA.02.01.01.01.11 Aplikasi Akreditasi Perpustakaan
				RAA.02.01.01.01.12 Aplikasi Indeks Literasi Masyarakat
				RAA.02.01.01.01.13 Layanan Pengelolaan Standardisasi Perpustakaan
				RAA.02.01.01.01.14 Layanan Tajuk Kendali Nasional

4.5. Pembangunan/Pengembangan Arsitektur Infrastruktur SPBE

Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe fasilitas serta seluruh system elektronik dan komponen lainnya. Sedangkan Subtansi Arsitektur Infrastruktur SPBE merupakan fasilitas serta seluruh system elektronik dan komponen lainnya yang dimiliki dan terkait dalam pendistribusian data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan SPBE.

Berdasarkan pendistribusian data dan informasi yang mengalir pada aplikasi dan infrastruktur SPBE, berikut hasil pemetaan terhadap infrastruktur SPBE Perpustakaan yang dapat disajikan melalui usulan referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE Perpustakaan:

Tabel Usulan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE Perpustakaan

Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat I	Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat II	Usulan Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat III	Usulan Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat IV
RAI Fasilitas Komputasi (01)	RAI Pusat Data Nasional (01.01)	RAI Pusat Data Perpustakaan (01.01.01)	RAI Pusat Data perpustakaan terintegrasi (01.01.01.01)
	RAI Pusat Komputasi (01.02)	RAI Komputasi perpustakaan terintegrasi (01.02.01)	
	RAI Pusat Kendali (01.03)	RAI Kendali gangguan layanan Perpustakaan (01.03.01)	RAI Kendali gangguan layanan sistem pengelolaan perpustakaan berbasis TIK (01.03.01.01)
			RAI Kendali

			gangguan layanan jaringan perpustakaan berbasis TIK (01.03.01.02)
			RAI Kendali gangguan layanan pengolahan data perkantoran (01.03.01.03)
Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat I	Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat II	Usulan Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat III	Usulan Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat IV
		RAI Kendali gangguan keamanan informasi dan siber organisasi (01.03.02)	
RAI Sistem Integrasi (02)	RAI Jaringan Intra Pemerintah (02.01)	RAI Jaringan Intra Perpustanas (02.01.01)	
	RAI Sistem PEnghubung Layanan Pemerintah (02.02)	RAI Sistem PEnghubung Layanan Data Perpustakaan (02.02.01)	
RAI Platform (03)	RAI Kerangka Infratsruktur dan Aplikasi (03.01)	RAI Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi Umum Perpustakaan (03.01.01)	
		RAI Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi Khusus Perpustakaan (03.01.02)	
		RAI Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi Administrasi Pemerintahan bidang Perpustakaan (03.01.02)	
	RAI Komputasi Awan (03.02)	RAI Komputasi awan sistem layanan publik Perpustakaan(03.02.01)	
		RAI Komputasi awan manajemen pengetahuan perpustakaan (03.02.02)	

4.6. Penerapan Manajemen Keamanan TIK dalam Domain Keamanan SPBE
Berbeda dengan domain arsitektur lainnya, substansi Domain keamanan SPBE akan menggambarkan tingkat kematangan penerapan keamanan TIK yang telah dilakukan oleh instansi.

Hasil pemetaan Arsitektur Keamanan TIK Perpunas sebagai berikut :

Standar dan Prosedur Keamanan SPBE yang telah di terapkan oleh Perpunas yaitu :

1. Perban BSSN No 4 Tahun 2021;
2. Perpres Nomor 95 Tahun 2018; dan
3. Perpres Nomor 5 Tahun 2018.

Standar internasional terkait keamanan informasi yang telah diterapkan oleh Perpunas yaitu :

1. The OWASP Application Security Verification Standard (ASVS);
2. The OWASP Application Security Verification Standard (ASVS): API & Web Service Security; dan
3. ISO 27001-Information Security Management.

Regulasi Lainnya yang telah diterapkan oleh Perpunas yaitu:

1. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2020 Tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi Perpustakaan Nasional; dan
2. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional.

Hasil dari pelaksanaan Audit Keamanan SPBE untuk Aplikasi dan Infrastruktur SPBE: (dalam kurun waktu 2 tahun terakhir) antara lain :

1. Audit Keamanan Aplikasi Inlis Enterprise yang diselenggarakan oleh auditor internal dengan hasil memadai pada tanggal 20 November 2020;
2. Audit Keamanan Aplikasi Inlis Enterprise yang diselenggarakan oleh auditor eksternal dengan hasil memadai pada tanggal 1 Desember 2020;
3. Audit Keamanan Aplikasi Inlis Enterprise yang diselenggarakan oleh auditor internal dengan hasil memadai pada tanggal 29 Oktober 2021;
4. Audit Keamanan Aplikasi Inlis Enterprise yang diselenggarakan oleh auditor eksternal dengan hasil memadai pada tanggal 3 November 2021;
5. Audit Keamanan Data Center yang diselenggarakan oleh auditor internal dengan hasil memadai pada tanggal 20 November 2020;
6. Audit Keamanan Data Center yang diselenggarakan oleh auditor eksternal dengan hasil memadai pada tanggal 1 Desember 2020;
7. Audit Keamanan Data Center yang diselenggarakan oleh auditor internal dengan hasil memadai pada tanggal 29 Oktober 2021; dan

8. Audit Keamanan Data Center yang diselenggarakan oleh auditor eksternal dengan hasil memadai pada tanggal 3 November 2021.

Berdasarkan pelaksanaan audit keamanan Teknologi dan Informasi Perpustakaan RI yang didasarkan pada renstra Perpustakaan, maka dari itu dapat disajikan hasil pemetaannya melalui Tabel usulan referensi arsitektur keamanan SPBE Perpustakaan sebagai berikut:

Tabel Referensi Arsitektur Keamanan SPBE Perpustakaan

Referensi Arsitektur Keamanan Tingkat I	Referensi Arsitektur Keamanan Tingkat II	Usulan Referensi Arsitektur Keamanan Tingkat III	Usulan Referensi Arsitektur Keamanan Tingkat IV
RAK Standar Keamanan(01)	RAK Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE(01.01)		
	RAK Standar Nasional/ Internasional terkait Keamanan APBE (01.02)		
	RAK Regulasi Lainnya (01.03)	RAK Regulasi bidang SPBE (01.03.01)	
		RAK Regulasi bidang Perpustakaan (01.03.02)	
RAK Penerapan Keamanan (02)	RAK Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE (02.01)		
	RAK Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE(02.02)		
	RAK Peningkatan Keamanan SPBE (02.03)		
	RAK Penanganan Insiden Keamanan SPBE(02.04)		
	RAK Audit Keamanan SPBE (02.05)		
RAK Kelaikan Keamanan (03)	RAK Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum (03.01)		
	RAK Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional(03.02)		

BAB V
PETA RENCANA SPBE PERPUSTAKAAN NASIONAL

INISIATIF STRATEGIS SPBE PERPUSNAS					
Domain	Kegiatan	Unit In charge	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
1. Tata Kelola					
A.	Peraturan Perpusnas tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Perpusnas	Pusdatin/ Inspektorat/ BiroHOKH	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Proses legislasi rancangan peraturan Kepala Perpusnas			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Penetapan Peraturan Perpusnas			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Bimtek/ Sosialisasi Peraturan Perpusnas				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peraturan Perpusnas			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Review Peraturan Perpusnas			<input checked="" type="checkbox"/>	
B.	Peraturan tentang Penyelenggaraan SPBE Perpusnas	Pusdatin/ BiroHOKH			
-	Sosialisasi Peraturan/ Keputusan Kepala Perpusnas			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peraturan/ Keputusan Kepala Perpusnas			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Review dan Tindak Lanjut Peraturan/ Keputusan Kepala Perpusnas			<input checked="" type="checkbox"/>	

INISIATIF STRATEGIS SPBE PERPUSNAS					
Domain	Kegiatan	Unit In charge	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
C.	Peraturan Kepala Perpustakaan tentang Tim Koordinasi SPBE Perpustakaan	Pusdatin/ BiroHOKH			
-	Perubahan atas ketetapan Keputusan Kepala Perpustakaan			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Sosialisasi Keputusan Kepala Perpustakaan			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Monitoring dan Evaluasi penerapan keputusan Kepala Perpustakaan			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Review dan Tindak Lanjut Keputusan Kepala Perpustakaan			<input checked="" type="checkbox"/>	
D.	Peraturan Kepala tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Perpustakaan	Pusdatin/ BiroHOKH			
-	Proses legislasi rancangan peraturan Kepala Perpustakaan			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Penetapan Keputusan Kepala Perpustakaan			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Sosialisasi Keputusan Kepala Perpustakaan			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Monitoring dan Evaluasi penerapan keputusan Kepala Perpustakaan				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Review dan Tindak Lanjut Keputusan Kepala Perpustakaan				<input checked="" type="checkbox"/>
.	Kebijakan Manajemen pengetahuan				
-	Proses legislasi rancangan peraturan Kepala Perpustakaan				<input checked="" type="checkbox"/>

INISIATIF STRATEGIS SPBE PERPUSNAS					
Domain	Kegiatan	Unit In charge	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
-	Penetapan Keputusan Kepala Perpustakaan				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Bimtek/ Sosialisasi Keputusan Kepala Perpustakaan				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Monitoring dan Evaluasi penerapan keputusan Kepala Perpustakaan				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Review dan Tindak Lanjut Keputusan Kepala Perpustakaan				<input checked="" type="checkbox"/>
E.	Keputusan Kepala tentang Tim CSIRT Perpustakaan	Pusdatin/ BiroHOKH			
-	Sosialisasi Keputusan Kepala Perpustakaan			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Monitoring dan Evaluasi penerapan keputusan Kepala Perpustakaan			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Review dan Tindak Lanjut Keputusan Kepala Perpustakaan			<input checked="" type="checkbox"/>	
F.	Keputusan Koordinator SPBE tentang tim Audit SPBE Perpustakaan	Pusdatin/ BiroHOKH			
-	Penetapan Keputusan Koordinator SPBE Perpustakaan			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Bimtek/ Sosialisasi Keputusan Koordinator SPBE Kepala Perpustakaan			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Monitoring dan Evaluasi penerapan keputusan Koordinator SPBE Perpustakaan				<input checked="" type="checkbox"/>

INISIATIF STRATEGIS SPBE PERPUSNAS					
Domain	Kegiatan	Unit In charge	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
-	Review dan Tindak Lanjut Keputusan Koordinator SPBE Perpunas				<input checked="" type="checkbox"/>
2. Manajemen SPBE					
A.	Manajemen Aset TIK	Pusdatin			
-	Penyusunan Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Aset TIK			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Penetapan Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Aset TIK			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Sosialisasi Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Aset TIK			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Implementasi Pedoman dan SOP Manajemen Aset TIK			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pedoman dan SOP Manajemen Aset TIK				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Review Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Aset TIK				<input checked="" type="checkbox"/>
B.	Manajemen Layanan SPBE	Pusdatin/ Pusjasintara			
-	Penyusunan Dokumen Pedoman dan SOP Penerapan Manajemen Layanan				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Penetapan Dokumen Pedoman dan SOP Penerapan Manajemen Layanan				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Sosialisasi Dokumen Pedoman dan SOP Penerapan Manajemen Layanan				<input checked="" type="checkbox"/>

INISIATIF STRATEGIS SPBE PERPUSNAS					
Domain	Kegiatan	Unit In charge	Baseline		
			2022	2023	2024
-	Implementasi Pedoman dan SOP Penerapan Manajemen Layanan				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pedoman dan SOP Manajemen Layanan				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Review dokumen Pedoman, SOP dan Penerapan Manajemen Layanan				<input checked="" type="checkbox"/>
C.	Manajemen Risiko SPBE	Pusdatin/ Inspektorat			
-	Penyusunan Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Risiko SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Proses Legislasi Rancangan Dokumen Pedoman, SOP Manajemen Risiko SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Penetapan Dokumen Pedoman, SOP Manajemen Risiko SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Sosialisasi Dokumen Pedoman, SOP Manajemen Risiko SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Implementasi Pedoman dan SOP Manajemen Risiko SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Montoring dan Evaluasi Penerapan Pedoman, SOP Manajemen Risiko SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Review Dokumen Pedoman, SOP Manajemen Risiko SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
D.	Manajemen Perubahan SPBE	Pusdatin/ BiroRenkeu			

INISIATIF STRATEGIS SPBE PERPUSNAS					
Domain	Kegiatan	Unit In charge	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
-	Penyusunan Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Perubahan SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Penetapan Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Perubahan SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Sosialisasi Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Perubahan SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Implementasi Pedoman dan SOP Manajemen Perubahan SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pedoman dan SOP Manajemen Perubahan SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Review Dokumen Pedoman, SOP dan Penerapan Manajemen Perubahan SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
E.	Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE	Pusdatin/ Biro SDMU			
-	Penyusunan Dokumen Pedoman dan SOP Sumber Daya Manusia SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Penetapan Dokumen Pedoman dan SOP Sumber Daya Manusia SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Sosialisasi Dokumen Pedoman dan SOP Sumber Daya Manusia SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Implementasi Pedoman dan SOP Sumber Daya Manusia SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pedoman dan SOP Sumber Daya Manusia SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Review Dokumen Pedoman, SOP dan Penerapan Sumber Daya Manusia SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>

INISIATIF STRATEGIS SPBE PERPUSNAS					
Domain	Kegiatan	Unit In charge	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
F.	Manajemen Pengetahuan	Pusdatin			
-	Penyusunan Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Pengetahuan SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Penetapan Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Pengetahuan SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Sosialisasi Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Pengetahuan SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Implementasi Pedoman dan SOP Manajemen Pengetahuan SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pedoman dan SOP Manajemen Pengetahuan SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Review Dokumen Pedoman, SOP dan Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
G.	Manajemen Keamanan Informasi	Pusdatin			
-	Penyusunan Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Keamanan Informasi SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Penetapan Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Keamanan Informasi SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Sosialisasi Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Keamanan Informasi SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Implementasi Pedoman dan SOP Manajemen Keamanan Informasi SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pedoman dan SOP Manajemen Keamanan Informasi SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Review Dokumen Pedoman, SOP dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>

INISIATIF STRATEGIS SPBE PERPUSNAS					
Domain	Kegiatan	Unit In charge	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
H.	Manajemen Data	Pusdatin			
-	Penyusunan Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Data SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Penetapan Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Data SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Sosialisasi Dokumen Pedoman dan SOP Manajemen Data SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Implementasi Pedoman dan SOP Manajemen Data SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pedoman dan SOP Manajemen Data SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Review Dokumen Pedoman, SOP dan Penerapan Manajemen Data SPBE				<input checked="" type="checkbox"/>
3. Layanan					
A.	Layanan Administrasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pusdatin			
-	Layanan Perencanaan	Renkeu	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan Penganggaran	Renkeu	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan Keuangan	Renkeu	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	SDMU	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan Kepegawaian	SDMU	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan Kearsipan	SDMU			

INISIATIF STRATEGIS SPBE PERPUSNAS					
Domain	Kegiatan	Unit In charge	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
			<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan Pengelolaan BMN	SDMU	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan Pengawasan Internal Terkait Pemerintah	Inspektorat	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Renkeu	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan Kinerja Pegawai	SDMU	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.	Layanan Publik Berbasis Elektronik	Pusdatin			
-	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Pusjasa, HOKH	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan Satu Data Perpustakaan	Pusdatin	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan JDIH	HOKH	<input checked="" type="checkbox"/>		
C.	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik	Pusdatin	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan Indonesia One Search	Pusdatin	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan iPusnas	Pusdatin		<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Layanan Bintang Pusnas	Pusdatin	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan e-Resources	Depbangkol			

INISIATIF STRATEGIS SPBE PERPUSNAS					
Domain	Kegiatan	Unit In charge	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
			<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan ISBN	Depbangkol	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan OPAC (<i>Online Public Access Catalogue</i>)	Pusjasa	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan Keanggotaan Online Perpustakaan	Pusjasa	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan Katalog Induk Nasional	Pusbiola	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Layanan Bibliografi Nasional	Pusbiola	<input checked="" type="checkbox"/>		
4. Aplikasi					
A.	Aplikasi Umum	Pusdatin			
A.1	Aplikasi Umum InlisLite			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Proses legislasi rancangan Arsitektur dan proses bisnis Aplikasi Umum InlisLite			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Penetapan Peraturan Kepala tentang Arsitektur dan proses bisnis Aplikasi Umum InlisLite			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Uji Coba Prototype dan design aplikasi InlisLite SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Pengembangan Prototype Aplikasi INLISLite			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Evaluasi dan Perbaikan aplikasi InlisLite			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Penetapan Aplikasi Umum InlisLite				

INISIATIF STRATEGIS SPBE PERPUSNAS					
Domain	Kegiatan	Unit In charge	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
				<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Uji Coba Implementasi Aplikasi InlisLite			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Launching Aplikasi Umum InlisLite			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Bimtek/ Sosialisasi Aplikasi Umum InlisLite			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Quality Assurance Aplikasi Umum InlisLite				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Monitoring dan Evaluasi (Audit Internal) Aplikasi InlisLite				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Sertifikasi Aplikasi Umum InlisLite				<input checked="" type="checkbox"/>
A.2.	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Pusdatin			
-	Aplikasi Perencanaan	Renkeu	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Aplikasi Penganggaran	Renkeu	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Aplikasi Keuangan	Renkeu	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Aplikasi Pengadaan Barang/ Jasa	SDMU	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Aplikasi Kepegawaian	SDMU	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Aplikasi Kearsipan	SDMU	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Aplikasi Pengelolaan BMN	SDMU			

INISIATIF STRATEGIS SPBE PERPUSNAS					
Domain	Kegiatan	Unit In charge	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
			<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Aplikasi Pengawasan Internal terkait pemerintah	Inspektorat	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Renkeu	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Aplikasi Kinerja Pegawai	SDMU	<input checked="" type="checkbox"/>		
B.	Aplikasi Khusus/ Publik Sektoral	Pusdatin			
-	Cakrawala	Pusjasa	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	IT Service desk	Pusjasa	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Indonesiana	Pusjasa	<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Tanya Pustakawan	Pusjasa	<input checked="" type="checkbox"/>		
5. Infrastruktur					
5.1	Infrastruktur SPBE Terintegrasi	Pusdatin			
-	Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan				<input checked="" type="checkbox"/>
6. Keamanan					

INISIATIF STRATEGIS SPBE PERPUSNAS					
Domain	Kegiatan	Unit In charge	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
6.1	Uji Kelaikan	Pusdatin			
-	Performance Test (<i>Stress Test/Load Test</i>)			<input checked="" type="checkbox"/>	
6.2	Penanganan Insiden Siber	Pusdatin			
-	Koordinasi Penanganan Insiden Siber secara internal dan eksternal			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Evaluasi Penanganan Insiden Siber			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Pelaporan			<input checked="" type="checkbox"/>	
6.3	Edukasi Keasadaran Keamanan	Pusdatin			
-	Sosialisasi kesadaran keamanan SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Evaluasi Kesadaran SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Pelatihan Tim Tanggap insiden Siber			<input checked="" type="checkbox"/>	
6.4	Identifikasi Kerentanan	Pusdatin			
-	Vulnerability Assesstment		<input checked="" type="checkbox"/>		
-	Penetration Test			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Uji Phising			<input checked="" type="checkbox"/>	

INISIATIF STRATEGIS SPBE PERPUSNAS					
Domain	Kegiatan	Unit In charge	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
6.5	Peningkatan Keamanan Informasi	Pusdatin			
-	Patching, Hardening, Bug Fixing dll			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Pembangunan SOC				<input checked="" type="checkbox"/>
7. Audit TIK					
A.	Persiapan TIK	Pusdatin			
-	Pelatihan Audit Internal SPBE Perpustakaan			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Pelatihan Lead auditor			<input checked="" type="checkbox"/>	
B.	Audit Aplikasi	Pusdatin			
-	Audit Internal Aplikasi Umum InlisLite			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Audit Eksternal Aplikasi Umum InlisLite				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Audit Eksternal Aplikasi Khusus SPBE Perpustakaan				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Tindak Lanjut rekomendasi hasil Audit Aplikasi Umum InlisLite				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Tindak Lanjut rekomendasi hasil audit Aplikasi Khusus SPBE Perpustakaan				<input checked="" type="checkbox"/>
C.	Audit Infrastruktur	Pusdatin			
-	Audit Internal Infrastruktur SPBE Perpustakaan				

INISIATIF STRATEGIS SPBE PERPUSNAS					
Domain	Kegiatan	Unit In charge	Target		
			2022	2023	2024
					<input checked="" type="checkbox"/>
-	Audit Eksternal Infrastruktur SPBE Perpusnas				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Tindak lanjut hasil audit infrastruktur SPBE Perpusnas				<input checked="" type="checkbox"/>
D.	Audit Keamanan TIK	Pusdatin			
-	Audit Internal Keamanan SPBE Perpusnas			<input checked="" type="checkbox"/>	
-	Audit Eksternal Keamanan SPBE Perpusnas				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Tindak Lanjut rekomendasi hasil Audit Internal Keamanan SPBE Perpusnas				<input checked="" type="checkbox"/>
-	Tindak Lanjut rekomendasi hasil Audit Eksternal l Keamanan SPBE Perpusnas				<input checked="" type="checkbox"/>

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIF BANDO